

## BAB I

### PENDAHULUAN

Seiring perkembangan globalisasi yang semakin pesat membuat seluruh negara harus bersiap diri menyelesaikan, dalam menghadapi ancaman yang kian terus datang. Terlebih dengan kecanggihan akibat globalisasi membuat banyaknya rivalitas antar negara satu sama lain sehingga dengan hal itu bisa menciptakan sebuah ancaman baru terhadap kawasan. Ancaman sendiri tidak hanya datang dari adanya tindakan kejahatan kriminal akan tetapi banyaknya tekanan dari rivalitas negara juga dapat membuat seluruh negara merasa tidak aman dan terancam (Rachmat, 2017, p. 132).

Dalam beberapa dekade ini ancaman keamanan non-tradisional menjadi realitas yang sangat mengganggu kawasan. Ancaman non-tradisional dapat terjadi karena adanya rivalitas negara yang telah memberikan dampak pada pergeseran politik, dan ketidaksetaraan sosial budaya. Sehingga melahirkan sebuah pergerakan radikal yang merugikan tidak hanya negara dikawasan tapi bisa berdampak ke global juga (Anthony & Emmers, 2016, p. 1).

Isu perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan isu kejahatan *Cybercrime* merupakan salah satu ancaman yang bersifat keamanan non-tradisional. Adapun ancaman ini semakin menjadi perhatian serius di dunia. Sebab dampak yang akan ditimbulkan akan mempengaruhi geopolitik negara. (Alami, 2015, p. 88). Seperti halnya yang terjadi di peristiwa terorisme di 9/11 Amerika Serikat. Akibat dari

peristiwa ini menjadikan lahirnya pembahasan terorisme di perairan seluruh negara (Wiratma & Suharman, 2016, p. 11). Dari dampak hal ini, kejahatan baru selain terorisme seperti isu *Human Trafficking* dan isu *Cybercrime* juga menjadi pembahasan seluruh negara, karena telah mengganggu stabilitas keamanan pada suatu negara.

Banyaknya penyebaran ancaman non-tradisional di beberapa perairan jalur strategis yang sangat luas membuat suatu negara tidak bisa menyelesaikan ancaman-ancaman tersebut sendiri. Maka dari itu salah satu penyelesaian utama untuk mengatasi ancaman, suatu negara diperlukan sebuah kerja sama antar negara lain (Pangestu, Hikmawan, & Fathun, 2021, p. 2). Agar dapat menciptakan kestabilan keamanan dan perdamaian di kawasan khususnya ancaman yang bersifat non-tradisional. Saat ini ancaman yang sangat melekat dengan keamanan non-tradisional ialah di perairan kawasan Indo-Pasifik.

Indo-Pasifik menjadi diperhatikan tidak hanya dari sisi banyaknya ancaman non-tradisional tetapi kawasan ini juga diperhatikan. Karena dianggap banyaknya reaksi negara-negara atas terpicunya dari sebuah sistem strategis yang terpicu pada hubungan ekonomi dan keamanan di antara negara-negara kawasan Indo-Pasifik (Nurhasya, 2018, p. 66). Sejarah konsep Indo-Pasifik pertama kali dimulai saat pada tahun 2007 dan dibahas oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe (Pangestu, Hikmawan, & Fathun, 2021, p. 2).

Istilah Indo-Pasifik muncul sebagai pengganti terminologi Asia-Pasifik (Montratama, 2016, p. 37). Dilihat secara geografis kawasan Indo Pasifik merupakan

salah satu kawasan yang terbentang luas dari benua Asia hingga pada benua Amerika yang berbatasan dengan Samudera Pasifik (Saputra & Sudirman, 2020, p. 215). Dengan luasnya perairan yang menggabungkan dua samudera, membuat Indo-Pasifik dikelilingi oleh negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia.

Selain pada kekuatan negara besar yang dimiliki oleh negara tersebut, kawasan Indo-Pasifik juga memiliki kekuatan pada organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Kawasan ini dikenal sebagai kawasan yang memiliki pemasokan sumber daya alam dan jalur yang strategis yang saling menghubungkan antar satu negara dengan yang lain. Alhasil, kawasan ini menjadi alasan bahwa Asia Tenggara menjadi kawasan yang cukup berpengaruh untuk Indo-Pasifik (Yani & Montratama, 2015, pp. 31-33).

Dengan penggabungan antara beberapa negara besar tersebut termasuk ASEAN yang masuk didalamnya, membuat masing-masing negara akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan mengenai konsep Indo-Pasifik. Beberapa konsep yang dibuat ini dapat dikatakan sebagai sebuah reaksi negara-negara bagian Indo-Pasifik atas ancaman yang terjadi. Serta menjadi sebuah geostrategi negara karena banyak negara yang melihat bahwa kawasan Indo-Pasifik memiliki wilayah yang strategis dan paling dinamis pada abad ke-21 sekarang ini (Montratama, 2016, p. 37)

Faktor latar belakang alasan Indo-Pasifik ini terbentuk tidak hanya meliputi banyaknya ancaman non-tradisional yang berada di perairan. Tetapi ancaman tradisional di Indo-Pasifik juga masih banyak isu yang melibatkan banyak negara,

yang sampai saat ini belum terselesaikan. Seperti halnya pada permasalahan sengketa Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, dan konflik antar sesama anggota ASEAN. Namun adanya kekuatan negara yang menjadi sumber utama pergeseran politik juga menjadi salah satu alasan Indo-Pasifik dibicarakan. Seperti halnya kebangkitan Tiongkok. (Montratama, 2016, p. 37).

Kebangkitan Tiongkok di Indo-Pasifik menjadikan seluruh negara merasa terancam termasuk Amerika Serikat, dimana dari hal ini telah menghasilkan membuat persaingan kekuasaan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Indo-Pasifik (Al Syahrin, 2018, p. 147). Rivalitas pada kekuasaan dua negara tersebut pada akhirnya telah mendorong dinamika keamanan Indo-Pasifik menjadi lebih tidak begitu stabil (Tertia & Perwita, 2018, p. 78). Apalagi saat ini banyak konflik sengketa di perairan Indo-Pasifik yang telah melibatkan Tiongkok didalamnya. Seperti isu sengketa maritime di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur (Pangestu, Hikmawan, & Fathun, 2021, p. 2). Sehingga dari hal ini mengakibatkan intensitas rivalitas meningkat.

Dikenal sebagai memiliki perairan yang sangat luas memang sudah menjadi bukan hal yang tidak mungkin jika ancaman keamanan maritim tidak terjadi di Indo-Pasifik baik itu bersifat tradisional ataupun non-tradisional. Terlebih dengan penggabungan kedua samudera yang memiliki banyak beberapa selat strategis dan menjadi jalur pelayaran tersibuk didunia. Membuat Indo-Pasifik harus menjadi pembahasan geopolitik yang dimiliki seluruh negara. Apalagi jalur strategis di Indo-Pasifik seperti Selat Malaka, Selat Hormuz dan

Selat Bab el Manzeb sangat rawan terhadap ancaman keamanan non-tradisional terutama untuk isu *Human Trafficking* (Salfauz, 2015, p. 56).

Menurut data dari ICC *International Maritime Bureau*, sejauh ini isu kejahatan transnasional di Indo-Pasifik meningkat mencapai 90% (ICC Maritime, 2020). Untuk isu pada eksploitasi *Human Trafficking* sendiri tingkat persennya mencapai 55% di wilayah Asia Pasifik. Begitupun juga dengan isu Cybercrime yang meningkat, di Indonesia sendiri sesuai rekapan data di tahun 2020. isu Cybercrime mencapai 88.414.296 (Badan Siber dan Sandi Negara, 2020). Ini terjadi dilatorbelakangi akibat adanya pandemi covid-19 yang telah mengakibatkan lumpuhnya ekonomi suatu negara. Sehingga menjadikan suatu negara melakukan akses kejahatan dengan menyerang teknologi.

Maka dari itu setelah melihat keamanan yang tidak terus stabil secara terus-menerus dan ancaman semakin meningkat, pembahasan Indo-Pasifik menjadi kembali dibicarakan oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Sebelumnya di tahun 2013 ketika Marty Natalegawa menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, konsep Indo-Pasifik pernah diangkat oleh Indonesia dan dikembangkan secara eksplisit melalui ASEAN (CNN Indonesia, 2018).

Secara khusus, ide yang disampaikan oleh Marty Natalegawa adalah bentuk dari perluasan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Namun pembahasan yang dikatakan oleh Marty Natalegawa tidak begitu di angkat. Karena pembahasan Indo-Pasifik juga dibahas kembali oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. (CNN Indonesia, 2018). Sampai akhirnya ketika seluruh negara mulai

satu persatu membuat sebuah konsep untuk mengatasi segala ancaman yang ada di Indo-Pasifik.

Pada tahun 2017 munculah beberapa konsep dari beberapa negara bagian Indo-Pasifik yaitu dari Amerika Serikat. Ketika di masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat secara resmi telah mengemukakan strategi mengenai pandangannya di kawasan Indo-Pasifik yaitu *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) dengan mengubah kawasan Asia Pasifik menjadi Indo-Pasifik (Antara News, 2019).

Konsep yang dibuat dari Amerika Serikat ini membuat banyak para pengamat berpendapat bahwa ini dibuat sebagai reaksi dari tingkat pertumbuhan Tiongkok yang semakin pesat. (Alby, Retnaningsih, & Nizmi, 2021, p. 28). Namun didalam agenda FOIP dari Amerika Serikat ini juga didalamnya memuat seputar hal kerja sama keamanan maritime bersama negara Indo-Pasifik yang mencakup keamanan non-tradisional seperti isu *human trafficking, cybercrime*, perompakan, pembajakan kapal, dan terorisme.

Amerika Serikat membawa FOIP yang bersifat bebas dan terbuka. Perkembangan dari ini semakin meluas hingga munculnya pandangan yang sama dari Jepang untuk menyetujui konsep tersebut (Iriawan, 2018, p. 283). Istilah munculnya dari *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) yang terdiri dari beberapa negara yaitu Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia juga merupakan salah satu definisi dari terwujudnya pandangan yang sama pada strategi FOIP (Alby, Retnaningsih, & Nizmi, 2021, p. 28).

Terlebih dengan adanya kebijakan *freedom of navigation* dari Amerika Serikat bersama FOIP ini yang dimana definisi dari istilah tersebut menunjukkan bahwa seluruh bebas melakukan navigasi di perairan negara lain untuk memenuhi kepentingannya (Richardo, 2019, p. 5). Di khawatirkan itu hanya akan menciptakan keagresian Tiongkok meningkat dan menjadikan kawasan Indo-Pasifik tidak stabil (Antara News, 2019).

Meskipun begitu ada beberapa point dari FOIP yang bisa diambil untuk kerja sama dalam mengatasi ancaman keamanan non-tradisional yaitu FOIP akan mendukung negara lain dalam memberantas ancaman keamanan non-tradisional seperti perompakan kapal, pembajakan, terorisme di kawasan dengan menggunakan *freedom of navigation* yang dimilikinya (Richardo, 2019, p. 5). Ini bisa kita lihat ketika Amerika Serikat melakukan kebebasan navigasinya di beberapa perairan Teluk Arab seperti Selat Hormuz.

Dari banyaknya kompleksitas konflik yang terjadi di Indo-Pasifik, serta adanya konsep FOIP yang telah dibuat Amerika Serikat untuk memuat kerja sama dalam mengatasi ancaman tradisional dan non-tradisional. Untuk terhindarnya dari perasaan memihak pada negara besar di Indo-Pasifik. Indonesia yang memiliki prinsip pertahanan *defensive* aktif akan merespon potensi ancaman tersebut dengan menggunakan langkah-langkah aktif. Agar dapat mewujudkan stabilitas keamanan juga perdamaian kawasan yang kondusif sebagai bagian kerangka agenda membangun arsitektur pertahanan (Yanuarti, Wibisono, & Midhio, 2020, p. 44) .



Terlebih kejahatan non tradisional masih banyak yang belum terselesaikan dan memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi (Lemhanas RI, 2021).

Jadi untuk itulah Indonesia perlu untuk memutuskan dalam membuat sebuah konsep kerja sama sendiri dalam melihat kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN. Indonesia memasukkan keterlibatan ASEAN di Indo-Pasifik juga bisa dikatakan sebagai penetral terhadap rivalitas kekuatan nasional antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui ASEAN, Indonesia sangat berharap bahwa negara besar untuk tidak terlalu fokus terlebih dahulu pada rivalitas dan harus memiliki prinsip yang sama untuk dapat bekerja sama dalam mengamankan keamanan non-tradisional di Indo-Pasifik. (Medcom.id, 2019).

Dengan konsep yang memang dibuat untuk ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia juga sangat berharap jika ASEAN dapat menunjukkan kemampuannya sebagai *lead* atau pemimpin di tengahnya pembahasan Indo-Pasifik (Pinter Politik, 2020). Setelah Indonesia memutuskan untuk mengembangkan konsep Indo-Pasifiknya melalui ASEAN, lalu munculah pembentukan konsep dari Indonesia untuk ASEAN yang di namakan sebagai *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP).

Konsep AOIP telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 23 Juni tahun 2019 di KTT ke-34 ASEAN Bangkok. Indonesia meyakini bahwa konsep AOIP ini memiliki proyeksi yang jelas untuk kawasan (Medcom.id, 2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* memiliki sebuah arti yang strategis. Dalam beberapa kali pertemuan mengenai pembahasan kawasan, ini menjadi pertama



kalinya ASEAN untuk menyepakati garis kebijakan tentang Indo-Pasifik (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, 2019).

Kebijakan yang dibuat sudah disepakati setelah melalui berbagai proses negosiasi yang memakan waktu lama. Hal ini dikarenakan, lamanya sebuah proses negosiasi tersebut telah mengindikasikan adanya perbedaan kebijakan dan kepentingan di antara negara-negara anggota ASEAN (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, 2019). Dalam hasil negosiasi yang telah disetujui oleh para anggota ASEAN, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ada lima hal utama yang terkait dalam sebuah kesepakatan pada Indo-Pasifik.

**Pertama**, tentang mengenai latar belakang dan faktor penting kenapa diperlukannya sebuah kebijakan *outlook* mengenai Indo-Pacific. **Kedua**, mengenai *key elements* (elemen-elemen yang menjadi kunci utama) dalam *outlook* tersebut. **Ketiga**, tujuan dari pembuatan *outlook*. **Keempat**, tentang prinsip-prinsip yang dicantumkan. **Kelima**, ialah area kerja sama yang melibatkan negara Indo-Pasifik (Nursalikhah, 2019).

Bersama konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* ini, Indonesia akan membuat konsep tersebut sebagai penaikan sentralitas, terbuka dan inklusif juga keamanan komprehensif dimana nantinya Indonesia dapat merangkul banyak negara dalam kerja sama di *ASEAN Outlook*. Berbeda dengan konsep FOIP yang diusung Amerika Serikat yaitu bebas dan terbuka. Serta halnya dengan konsep *Belt and Road Initiative* dari Tiongkok sebagai keberlanjutan proyeknya dalam melihat konsep Indo-Pasifik. Ataupun dari The SAGAR yang digagas oleh India (Medcom.id, 2019).

Dengan kata lainnya konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* ini dibuat untuk meningkatkan kerja sama pada beberapa negara besar di Indo-Pasifik dalam mengamankan stabilitas kawasan (Medcom.id, 2019). Adanya kebijakan pandangan yang berbeda-beda dari negara besar dalam melihat kawasan Indo-Pasifik, Indonesia semakin mendorong untuk memajukan gagasan *ASEAN Outlook* ini sebagai kebijakan yang harus dimiliki ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Untuk memperkenalkan dan mempromosikan konsep *ASEAN Outlook* maka akan sangat diperlukannya sebuah strategi diplomasi Indonesia agar dapat membuat stabilitas keamanan kawasan di Indo-Pasifik terutama untuk non-tradisional. Diplomasi menjadi jalan utama Indonesia, dikarenakan tidak mudah untuk Indonesia dalam merangkul negara-negara besar agar dapat bekerja sama antar negara. Mengingat adanya konflik bilateral yang menjadi penghalangnya.

Oleh sebab itu, untuk menentukan stabilitas keamanan non-tradisional di kawasan Indo-Pasifik itu tergantung bagaimana strategi diplomasi yang ditawarkan. Jika Indonesia berhasil dalam melakukan diplomasinya, maka tidak hanya dari keamanan yang stabil aja didapatkan. Tetapi nantinya Indonesia juga akan mendapat nilai positif dimana perannya sebagai pemersatu negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan penengah di Indo-Pasifik (Anwar, 2020, p. 129).

Berkenaan dengan konsep yang dibawa yaitu *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, Indonesia memastikan implementasi kerja sama Indo-Pasifik akan berjalan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Melalui adanya pembentukan kebijakan

*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang dipelopori oleh Indonesia dan memang ditujukan untuk ASEAN sebagai kebijakan yang harus dimiliki. Indonesia sangat berharap dengan AOIP ini bisa membawa stabilitas keamanan Indo-Pasifik menjadi stabil terutama untuk keamanan non-tradisional. Sebab bisa kita lihat bahwa justru dengan adanya rivalitas beberapa negara malah semakin membuat potensi ancaman keamanan non-tradisional juga ikut meningkat.

Terlebih saat ini masih banyak kejahatan non tradisional yang terjadi seperti isu *human trafficking*, *cybercrime*, penyelundupan narkoba, *illegal fishing*, perompakan kapal, penyelundupan senjata, terorisme, dan isu maritime lainnya di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun Amerika Serikat dan Tiongkok sudah mempunyai konsep tersendiri untuk mengatasi ancaman keamanan non tradisional di Indo-Pasifik. Justru itu tidak membuat konsepnya dapat menjadikan kawasan menjadi aman.

Dari hal tersebutlah untuk dapat menjaga stabilitas keamanan yang bersifat non tradisional di Indo-Pasifik. Maka Indonesia membutuhkan sebuah penawaran yang menarik di *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* agar dapat merangkul seluruh negara kawasan Indo-Pasifik untuk mewujudkan perdamaian pada kawasan. Setelah melihat situasi yang semakin tidak menentu, penelitian ini akan diangkat menjadi skripsi dengan melihat bagaimana implikasi Indonesia dalam melakukan strategi diplomasinya untuk menerapkan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* sebagai perwujudan untuk meningkatkan stabilitas keamanan non tradisional di kawasan

Indo-Pasifik. Mengingat beberapa negara sudah mempunyai konsep masing-masing dalam melihat kawasan Indo-Pasifik.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Maka berdasarkan pemaparan diatas, pertanyaan yang paling tepat dalam penelitian ini ialah: “Bagaimana implikasi strategi diplomasi Indonesia dalam menerapkan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* terhadap peningkatan stabilitas keamanan non tradisional kawasan Indo-Pasifik?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mendeskripsikan dan agar dapat menggambarkan alasan Indonesia mulai membicarakan kembali Indo-Pasifik serta mengetahui bagaimana implikasi dari strategi diplomasi Indonesia dalam menerapkan konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk meningkatkan stabilitas keamanan non tradisional di Indo-Pasifik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diberikan oleh penulis melalui penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan sebuah ilmu pengetahuan pada sesama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional. Serta dapat mempelajari kepentingan Indonesia di Indo-Pasifik melalui konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.
2. Bisa memberikan sebuah penerapan teori yang tepat untuk melengkapi penelitian ini.
3. Memberikan sebuah arahan sesama mahasiswa ilmu Hubungan Internasional untuk ikut lebih meneliti tentang Indo-Pasifik

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sebuah gambaran dari adanya strategi pemerintah Indonesia ke depannya dalam lingkup Internasional terutama untuk di kawasan Indo-Pasifik.
2. Dapat memberikan informasi untuk mengetahui bagaimana sikap yang tepat untuk Indonesia dalam menghadapi banyaknya tekanan rivalitas dari negara *major powers* di kawasan Indo-Pasifik
3. Mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional pada perkembangan modern saat ini.
4. Terakhir dapat mengetahui implikasi apa saja yang dapat Indonesia tawarkan melalui konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* pada negara

lain terhadap ancaman keamanan non-tradisional. Mengingat beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik juga mempunyai konsep tersendiri.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

Bab ini memaparkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Melalui bab ini diharapkan akan memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai pembahasan yang akan dibahas.

### **BAB II**

Bab ini akan memaparkan tentang penelitian terdahulu, teori dan konsep serta alur pemikiran yang digunakan.

### **BAB III**

Bab ini akan memaparkan metode penelitian yang akan penulis gunakan. Metodologi sendiri mencakup paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

### **BAB IV**

Bab ini akan memaparkan pembahasan yang akan dibahas sesuai dengan apa yang ditulis di rumusan masalah. Adapun data yang diperoleh untuk menulis pembahasan berasal dari data yang diperoleh penulis melalui studi pustaka dan wawancara.

## **BAB V**

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran dari apa yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya.

